

**UPAYA BANK SYARIAH DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* OLEH CALON DEBITUR AKIBAT
KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RENI IRAWAN

NIM. 0810110188



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **UPAYA BANK SYARIAH DALAM MENCEGAH
PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH OLEH CALON DEBITUR AKIBAT
KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Bank BRI
Syariah Cabang Pandaan)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Reni Irawan**

b. NIM : **0810110188**

Konsentrasi : **Hukum Perdata Bisnis**

Jangka Waktu Penelitian : **2 bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabuddin, SH.MH.

Siti Hamidah, SH.MM.

NIP: 19591216 198503 1 001

NIP: 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.MM.

NIP: 19660622 199002 2 001

**UPAYA BANK SYARIAH DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* OLEH CALON DEBITUR AKIBAT
KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR**

Reni Irawan

Email : ir.reni@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas permasalahan tentang: (1) Bagaimana upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor? (2) Apa faktor pendukung dan penghambatnya?. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini akan sarana transportasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Bank BRI Syariah Cabang Pandaan salah satu bank yang menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* (jual beli) untuk pembelian secara pemesanan barang. Akan tetapi, pastinya dalam pemesanan barang terdapat adanya permasalahan yaitu tidak kesesuaian dari barang yang dipesan oleh calon debitur.

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis sosiologis yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan fakta di lapangan terkait upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer ini berupa pengalaman pihak BRI Syariah Cabang Pandaan, pendapat pihak-pihak BRI Syariah Cabang Pandaan yang mengetahui mengenai pembiayaan *murabahah* dan upaya dari pihak-pihak BRI Syariah Cabang Pandaan dan data sekunder ini berupa dokumen, akad *murabahah* serta data arsip Bank BRI Syariah Cabang Pandaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tentang pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan metode analisa data *deskriptif kualitatif* yaitu analisis terhadap data yang bertujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa upaya Bank BRI Syariah cabang Pandaan dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu mengganti objek jual beli kendaraan bermotor dengan persetujuan debitur dan musyawarah dengan cara negosiasi dengan calon debitur mengenai kesepakatan kesesuaian harga dan barang. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka biaya riil bank harus dibayar debitur dari uang muka. Faktor pendukungnya yaitu pengutamaan upaya musyawarah dan mengganti objek jual beli kendaraan bermotor. Faktor penghambatnya yaitu jika debitur sulit untuk diajak musyawarah karena sibuk dengan mengurus pekerjaannya dan menunggu inden lama.

Kata Kunci : *Bank Syariah, Pembiayaan, Murabahah, Debitur*

ABSTRACT

The article is discussing some problems including (1) How is the action taken by Bank Syariah to prevent the cancellation of murabahah financing agreement by the debtor prospect due to the unreliability of transaction object of motorized vehicle? (2) What are the supporting and constraining factors?. This is motivated by the rapid development of today's society for transportation vehicles. Therefore, the Banking Syariah of Pandaan Branch one bank use financing system murabahah (transaction) for purchase ordering of goods. However, the exact ordering of goods is occur problems is unreliability of the goods ordered by the debtor prospect sometimes there is also a hidden disability.

The writing of this paper uses sociological juridical method. It is made based on the statutes and the observed fact in relative with the action of Bank Syariah to prevent the cancellation of murabahah financing agreement by the debtor prospect due to the unreliability of transaction object of motorized vehicle. Type of data in this research includes primary data such as experience from the parties BRI Syariah of Pandaan Branch, opinion from the parties BRI Syariah of Pandaan Branch know about murabahah financing and action of the parties BRI Syariah of Pandaan Branch, and also secondary data involving document, murabahah certificate, and the archive of BRI Syariah of Pandaan Branch. Data analysis method is qualitative descriptive which aims to describe all phenomena in the practice.

From result of the research indicates, author obtained answer that action BRI Syariah of Pandaan Branch prevent the cancellation of murabahah financing agreement by the debtor prospect due to the unreliability of transaction object of motorized vehicle through several ways, such as by compensating the transaction object of motorized vehicle based on agreement and assembly with the debtor prospect, or by negotiating with the debtor prospect about the price and goods agreement. If the assembly does not reach the agreement, the real cost of the bank must be paid by debtor in the front. The supporting factor is the prioritization of assembly and the compensation of the transaction object of motorized vehicle. The constraining factor is that the debtor is difficult to do an assembly because they are the busy person for their business and they are always waiting long for the indent

Keywords: Bank Syariah, Financing, Murabahah, Debtor

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi yang merupakan upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tujuan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan baik pemerintah maupun masyarakat, baik

perseorangan maupun badan hukum membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan dalam mewujudkan pembangunan.

Seiring dengan kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat dan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki masyarakat yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncul lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Bank merupakan suatu lembaga perbankan yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh fasilitas yang di berikan kepada masyarakat antara lain adalah pemberian kredit. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa fungsi dari bank adalah sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.¹

Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang tersebut belum spesifik sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian Perbankan Syariah pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara operasionalnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, Hal.19

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa maupun *profit margin*, serta bagi hasil.

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau yang lebih dikenal sebagai bank syariah bukan merupakan hal baru lagi. Hal tersebut merupakan salah satu wujud dari keinginan dunia perbankan untuk memberikan pemenuhan jasa perbankan yang berbasis syariah. Sejak awal 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan hadiah atau kompensasi kerja.

Mungkin sebagian dari masyarakat ada yang menganggap bahwa Bank Syariah hanya untuk komunitas muslim. Tetapi tidak benar demikian, karena siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan Bank Syariah. Ketika krisis moneter melanda Indonesia, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar, akan tetapi fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari Bank Syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan Bank Syariah. Penentuan presentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman. Bermula dari permasalahan tersebut, ekonom dan para ahli hukum Islam di berbagai negara berusaha memperkenalkan konsep sistem perbankan Islam adalah tidak digunakannya sistem bunga, akan tetapi yang digunakan adalah sistem bagi hasil.

Posisi unik lainnya dari Bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multifinance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*) atau sewa beli (*ijarah wa iqtina*) dan lain-lain.

Murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah, yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal antara bank syariah dan nasabah.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda.

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

- a. Mempercepat pembayaran cicilan; atau
- b. Melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.² Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atau jaminan atas piutang pembiayaan *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Selain itu Bank juga dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang pembiayaan *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Kedudukan bank disini adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Walaupun kedudukan bank sebagai penjual pengadaan barang dilakukan oleh nasabah itu sendiri, kewajiban dari bank hanyalah sebagai pembiayaan yang berfungsi menyediakan pembiayaan dan mengurus dokumen-dokumen terkait seperti halnya pembuatan kontrak apabila nasabah telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank. Kepemilikan barang dalam pembiayaan *murabahah* langsung atas nama dari nasabah itu sendiri seketika setelah nasabah melakukan transaksi jual beli dengan supplier, tetapi bukti kepemilikan tersebut dipegang oleh bank yang fungsinya adalah

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 80

sebagai jaminan bagi bank agar nasabah memiliki kesungguhan dalam melunasi kewajiban angsurannya.

Bai'al-murabahah juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada Pemesan Pembelian. Jual beli tersebut terjadi apabila barang atau produknya belum dikuasai atau memiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

Semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi juga semakin pesat. Masyarakat sekarang ini cenderung mempunyai kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum. Kendaraan pribadi selain untuk digunakan pribadi sendiri juga dapat digunakan untuk usaha travel yang sekarang semakin banyak usaha travel dimana-mana. Walaupun ada banyak masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli kendaraan yang diinginkan, namun dengan perkembangan dewasa ini masalah dana bukan lagi merupakan penghalang yang besar.

BRI Syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli dan memiliki kendaraan yang diinginkan. Oleh karena itu, BRI Syariah Cabang Pandaan salah satu bank yang menggunakan sistem pembiayaan *Ba'i al-murabahah* (jual beli) untuk pembelian secara pemesanan barang. Dengan memenuhi syarat-syarat pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan BRI Syariah Cabang Pandaan, masyarakat yang tidak cukup dana dapat membeli kendaraan yang diinginkan. Sistem pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian kendaraan, baik baru maupun bekas. Akan tetapi, pastinya dalam pemesanan barang terkadang tidak luput dari suatu permasalahan seperti terdapat cacat fisik yang tersembunyi atau tidak kesesuaian dari barang yang dipesan oleh nasabah tersebut. Oleh karena itu diperlukan masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli barang dan bank dapat melakukan upaya untuk menyelesaikan atau menghindari terjadinya suatu permasalahan tersebut yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian pembiayaan *Murabahah*.

Contoh kasusnya yang terdapat di Bank BRI Syariah cabang Pandaan³ yaitu H.Abd Rochim adalah seorang pengusaha wiraswasta menengah yang berumur 30 tahun mempunyai usaha elektronik di pasar pandaan. Usaha H.Abd Rochim tersebut

³ Hasil wawancara dengan Irwan Saputra, S.H., Relation Officer BRI Syariah Cabang Pandaan, tanggal 10 juni 2013

sudah berjalan 3 tahun dan mempunyai 5 karyawan serta hanya memiliki 1 mobil pick up. Banyaknya pembeli elektronik di perusahaan H.Abd Rochim dan persaingan bisnis usaha elektronik yang banyak pula, H.Abd Rochim ingin menambah kendaraan yaitu 1 mobil pick up agar usahanya tetap berkembang dan dapat bersaing dengan pengusaha lain. H.Abd Rochim ingin cepat memiliki mobil pick up akan tetapi H.Abd Rochim kekurangan dana untuk membelinya. Kemudian H.Abd Rochim datang ke Bank BRI Syariah untuk mengajukan pembiayaan murabahah dengan pemesanan pembelian mobil pick up. Setelah itu, Bank BRI Syariah memproses pengajuan pembiayaan dari H.Abd Rochim. H.Abd Rochim ingin membeli mobil pick up dengan spesifikasi merk suzuki yaitu Mega Carry Xtra. Dalam pengajuan pembiayaan tersebut Bank BRI Syariah meminta pembayaran uang muka untuk tanda bukti keseriusan debitur. Kemudian H.Abd Rochim memberikan uang muka tersebut kepada Bank BRI Syariah. Karena pengajuan pembiayaan H.Abd Rochim sudah memenuhi persyaratan prosedur bank maka pengajuan pembiayaan tersebut diacc oleh Bank BRI Syariah.

Kemudian Bank BRI Syariah segera mendatangi supplier mobil pick up untuk membelinya karena H.Abd Rochim sangat butuh cepat mobil tersebut. Setelah itu Bank BRI Syariah menemukan mobil pick up merk suzuki yaitu mega carry Xtra yang diinginkan H.Abd Rochim akan tetapi warna yang ditemukan Bank BRI Syariah warna putih. Setelah itu Bank BRI Syariah memberi kabar kepada H.Abd Rochim bahwa pihak Bank sudah menemukan mobil pick up yang diinginkan. Pihak supplier kemudian mengantarkan mobil tersebut ke H.Abd Rochim. H.Abd Rochim setelah mengetahui warna mobil pick up nya tidak sesuai dengan yang diinginkan, H.Abd Rochim menolak mobil tersebut dan ingin membatalkannya. H.Abd Rochim memilih warna hitam karena ingin menyamakan dengan warna mobil pick up di tempat usahanya.

Akibat hukumnya Bank harus mengalami kerugian karena sudah membeli barang pesanan debitur tersebut. Bank selaku penjual dapat menggunakan uang muka yang diminta dari debitur selaku pembeli untuk menutup kerugian, apabila jumlah uang muka tersebut lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus ditanggung penjual, penjual dapat meminta kekurangannya.

Ada dua pendapat mengenai *murabahah* dari Sutan Remy Syahdeini⁴ yaitu bahwa *murabahah* dapat tetap dianggap sah sekalipun dibuat dengan satu perjanjian saja, yaitu perjanjian 3 pihak. Yang perlu dijaga adalah bahwa dalam perjanjian itu bank tidak sekedar bertindak sebagai kuasa dari dan, dengan demikian, bertindak untuk dan atas nama nasabah. Hukum perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHPdata memungkinkan diperjanjikannya dua transaksi dalam satu perjanjian dengan tiga pihak. Apabila kedua transaksi tersebut yaitu transaksi antara bank dan pemasok barang dan transaksi antara bank dan pembeli barang nasabah terkait satu dengan yang lain harus dibuat dengan dua perjanjian terpisah, bank dapat dihadapkan pada risiko kemungkinan barang yang sudah dipesan dari dan diserahkan oleh pemasok barang akan menghadapi risiko tidak dibeli oleh nasabah. Misalnya, karena suatu alasan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dibatalkan oleh nasabah.

Transaksi *murabahah*, sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi, pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan. Hanya dengan diciptakannya hubungan-hubungan hukum dalam satu dokumen perjanjian antara pihak-pihak (3 pihak) dalam transaksi *murabahah*, fungsi bank sebagai lembaga pembiayaan dapat terjaga dan tidak beralih menjadi berfungsi sebagai pedagang barang. Dalam transaksi *murabahah* harus dimungkinkan terjalinnya sekaligus hubungan-hubungan hukum sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara bank dan pemasok barang.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah pembeli barang.
3. Hubungan hukum antara nasabah pembeli barang dan pemasok barang.

Menurut Adiwarmarman Aswar K⁵ transaksi *murabahah* dengan pesanan dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah ada dua, yaitu transaksi *murabahah* pertama adalah ketika nasabah sebagai wakil bank membeli barang itu secara tunai *original seller* dan transaksi *murabahah* kedua adalah ketika bank sebagai pemilik barang menjual secara cicilan kepada nasabah.

Dalam praktiknya, tenaga pelaksana di lapangan biasanya enggan menerangkan seluk-beluk dan landasan fiqih *murabahah* atau bisa jadi menganggap calon nasabah telah paham. Karena itu, *murabahah* disimplikasi dalam satu rangkaian kalimat pendek, “Margin kami 20% per tahun.” Tentu saja banyak masyarakat yang mengira bank syariah sekedar mengganti istilah bunga dengan margin. Belum lagi keteledoran

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, Hal.66-67

⁵ Adiwarmarman Aswar K, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2000, Hal. 90-91

pemenuhan rukun dan syarat fiqihnya, antara lain harus ada barang yang diperjualbelikan. Bukannya bank syariah tidak dapat memenuhi kebutuhan selain untuk membeli barang, tetapi skimnya bukan *murabahah*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian karena ingin mengidentifikasi dan mendeskripsikan Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor di Bank Syariah Cabang Pandaan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yang dimaksud penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang difokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan terjun langsung mengunjungi lokasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dimana metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis ini lebih mengkaji permasalahan ditinjau dari segi hukum normatif atau segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat, serta dapat mengkaji dan meneliti permasalahan berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam metode penulisan ini yang disebut sebagai hukum normatif adalah pasal 2 ayat 5 dan 6 Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* perihal ketentuan *murabahah* kepada nasabah dan pasal 122 dan pasal 123 Bab V Bagian

Ketujuh Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad perihal jual beli *murabahah* yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya Bank Syariah mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan karena BRI Syariah telah mengeluarkan salah satu produk pembiayaan berupa akad *murabahah* Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan sistem *murabahah* kepada pemesan pembelian kendaraan bermotor. Selain itu juga telah pernah terjadi pembatalan dan ada upaya untuk mengatasinya.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya; diamati dan di catat untuk pertama kalinya.⁶ Data primer ini berupa pengalaman dari pihak BRI Syariah Cabang Pandaan, pendapat dari pihak-pihak BRI Syariah Cabang Pandaan yang mengetahui mengenai pembiayaan *murabahah* serta upaya pihak BRI Syariah Cabang Pandaan dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan penghambat dalam upaya Bank Syariah menghindari pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, akad *murabahah* serta data arsip Bank BRI Syariah Cabang Pandaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tentang pembiayaan *murabahah*.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari pihak Bank BRI Syariah Cabang Pandaan, debitur dan notaris yang mengetahui mengenai data penelitian

⁶ Marzuki, *Metedologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1977, hlm. 55

yang dibutuhkan oleh penulis khususnya yang bertugas menangani pembiayaan *murabahah*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Lembaga Bank BRI Syariah Cabang Pandaan, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumen Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan cara-cara melalui:

- a. Teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terarah, yaitu peneliti sudah mengatur atau menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan teknik kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait maupun data yang ada pada instansi yang berhubungan dengan peneliti berupa dokumen-dokumen tertentu yang ada di bank tempat penelitian dilakukan, serta dengan melakukan penelusuran internet.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁸ Pengambilan sampel akan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu dengan memilih beberapa subyek sampel dari

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.118

⁸ *Ibid*, Hal.119

anggota populasi sampel yang dianggap dapat mewakili populasi, sampel, yang diasumsikan mengetahui permasalahan yang dikaji dan dapat memberikan informasi yang tepat. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel yang berhubungan erat dengan kasus yang menjadi bahan penelitian.⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah 1 unit head, 1 relation officer, 1 sales officer, 1 notaris dan 1 debitur BRI Syariah Cabang Pandaan. 1 Debitur tidak dapat dijadikan sampel penelitian karena dari pihak BRI Syariah Cabang Pandaan tidak mengizinkan sebab hal tersebut termasuk rahasia bank.

7. Teknik Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.¹⁰ Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik atau metode *deskriptif kualitatif* untuk memperoleh kejelasan mengenai upaya Bank Syariah dalam menghindari pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan penghambat dalam upaya Bank Syariah menghindari pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan, untuk mengoptimalkan kepastian hukum sehingga nantinya dapat membuat suatu kesimpulan mengenai upaya Bank Syariah menghindari pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor sesuai dengan Prinsip Syariah (hukum Islam).

⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, Hal.165

¹⁰ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, Hal.129

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum BRI Syariah

Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada awalnya didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en' Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambetenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI berdasarkan PP No. 1 Tahun 1946 pasal 1, disebutkan bahwa BRI sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia.

Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan mulai baru aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No.41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan penetapan Presiden (Penpres) No.9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No.17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No.13 Tahun tentang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 1968, menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia

pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.¹¹

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

¹¹ <http://www.brisyariah.co.id> ,dibuat tahun 2011, diakses tanggal 1 Agustus 2013

2. Upaya Bank BRI Syariah dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara¹² upaya BRI Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor, yaitu:

1. mengganti objek jual beli kendaraan bermotor mobil pick up merk suzuki yaitu mega carry Xtra yang sebelumnya berwarna putih diganti dengan warna hitam dengan persetujuan calon debitur mau menunggu inden objek tersebut dari pemasok yang lumayan lama.
2. jika terjadi perselisihan pihak Bank Syariah selalu mngutamakan dengan upaya jalan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan debitur untuk mencapai kesepakatan. Pihak bank melakukan upaya musyawarah dengan cara negoisasi dengan calon debitur mengenai kesepakatan kesesuaian harga dan barang.
3. apabila jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, agar bank tidak mengalami kerugian sesuai dengan pasal 2 ayat 5 dan 6 Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, perihal ketentuan *murabahah* kepada nasabah yaitu:
 - i. pasal 2 ayat 5 bahwa jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - ii. pasal 2 ayat 6 bahwa jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
4. dapat juga menggunakan Bab V Bagian Ketujuh Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad perihal jual beli *murabahah*, yaitu pasal 118 yang berbunyi bahwa pihak penjual dalam *murabahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad. Pasal 122 dan pasal 123 yang bunyinya hampir sama dengan pasal 2 ayat 5 dan 6 Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yaitu
 - i. pasal 122: jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

¹² Hasil wawancara dengan Mochamad Rosyidin, S.H., Notaris BRI Syariah Cabang Pandaan, tanggal 18 juli 2013

- ii. pasal 123: jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

Jumlah uang muka tersebut dapat dilihat di pasal 3 ayat 1 akad pembiayaan *murabahah* mengenai fasilitas pembiayaan dan harga yang berbunyi :

“bank menyediakan barang melalui pemberian fasilitas pembiayaan sesuai permintaan nasabah dan nasabah dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari bank dan karenanya berhutang kepada bank sebesar harga jual yang terdiri dari:

- Harga beli : Rp.100.000.000
- Margin Keuntungan : Rp.40.500.049
- Harga jual awal : Rp.140.500.049
- Uang muka : Rp.25.000.000
- Harga jual setelah uang muka : Rp.115.500.049
- Pembiayaan bank : Rp.75.000.000

Hal-hal yang dilakukan untuk pengembangan dalam upaya BRI Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor kepada nasabah, yaitu:¹³

1. Mempersiapkan suatu bentuk Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* terstandar yang dapat melindungi kepentingan hukum PT. BRI Syariah, Tbk. Contohnya dengan cara dalam pembuatan akad pembiayaan *murabahah* yang merupakan perjanjian jual beli dilakukan di depan notaris secara notariil.
2. Melakukan review secara berkala terhadap perjanjian antara bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses enforceability tersebut untuk memeriksa validitas hak dalam perjanjian tersebut.
3. Mengembangkan sistem administrasi pembiayaan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Seluruh operasional administrasi harus dilakukan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini termasuk tapi tidak terbatas pada manajemen dokumen,

¹³ Hasil wawancara dengan Mochamad Rosyidin, S.H., Notaris BRI Syariah Cabang Pandaan, tanggal 18 juli 2013

monitoring progress, review berkelanjutan atas persyaratan kontrak perjanjian pembiayaan, pemeriksaan dan pengikatan jaminan dan agunan.

- b) Adanya manajemen informasi untuk memastikan kelengkapan dokumen ketepatan waktu atas dokumen yang diproses.
 - c) Adanya petugas yang lengkap dengan fungsi-fungsi yang spesifik dalam memproses Pembiayaan *Murabahah*.
 - d) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal serta ketentuan yang berlaku.
4. Mengembangkan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk dapat menunjang penerapan Pembiayaan *Murabahah* yang sesuai dengan prosedur internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Bank BRI Syariah Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara¹⁴ faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1. Faktor Pendukung dalam upaya BRI Syariah mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor
 - a. Pengutamaan upaya musyawarah oleh BRI Syariah cabang Pandaan yang ditawarkan kepada debitur agar mencapai suatu mufakat sehingga baik bank maupun debitur tidak mengalami kerugian.
 - b. Dengan mengganti objek jual beli kendaraan bermotor yang sesuai dengan pesanan calon debitur karena harga kendaraan bermotor warna hitam yang dipesan debitur hampir sama dengan harga kendaraan bermotor warna putih dari pemasok.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Irwan Saputra, Relation Officer BRI Syariah Cabang Pandaan, tanggal 25 juli 2013

2. Faktor Penghambat dalam upaya BRI Syariah mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor
 - a. jika debitur sulit untuk diajak musyawarah karena tidak ada waktu senggang mengurus hal tersebut karena sibuk dengan mengurus pekerjaan usaha yang dimilikinya itu.
 - b. jika calon debitur tetap menolak penggantian objek jual beli kendaraan bermotor karena harus menunggu inden dari pemasok lumayan lama.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yaitu bahwa:

1. Upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara mengganti objek jual beli kendaraan bermotor mobil pick up merk suzuki yaitu mega carry Xtra yang sebelumnya berwarna putih diganti dengan warna hitam dengan persetujuan calon debitur mau menunggu inden objek tersebut dari pemasok yang lumayan lama, upaya musyawarah dengan cara negosiasi dengan calon debitur mengenai kesepakatan kesesuaian harga dan barang. Apabila jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, agar bank tidak mengalami kerugian sesuai dengan pasal 2 ayat 5 dan 6 Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, perihal ketentuan *murabahah* kepada nasabah dan sesuai dengan pasal Pasal 122 dan pasal 123 Bab V Bagian Ketujuh Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad perihal jual beli *murabahah*.
2. Faktor Pendukung yaitu pengutamaan upaya musyawarah oleh BRI Syariah cabang Pandaan yang ditawarkan kepada debitur agar mencapai suatu mufakat sehingga baik bank maupun debitur tidak mengalami kerugian dan mengganti objek jual beli kendaraan bermotor yang sesuai dengan pesanan calon debitur karena harga kendaraan bermotor warna hitam yang dipesan debitur hampir sama dengan harga kendaraan bermotor warna putih dari pemasok.

Faktor Penghambatnya jika debitur sulit untuk diajak musyawarah karena tidak ada waktu senggang mengurus hal tersebut karena sibuk dengan mengurus pekerjaan usaha yang dimilikinya itu dan jika calon debitur tetap menolak penggantian objek jual beli kendaraan bermotor karena harus menunggu inden dari pemasok lumayan lama.

B. Saran

1. Bagi Pihak Bank

- a. Pihak Bank hendaknya menjelaskan lebih detail mengenai produk pembiayaan *murabahah* dengan cara pemesanan objek jual beli secara rinci kepada calon debitur.
- b. Pihak Bank hendaknya memberi kesempatan calon debitur untuk memilih barang langsung ke tempat pemasok barang.

2. Bagi Pihak Debitur

- a. Pihak Debitur hendaknya lebih kritis dalam mengetahui dan memperhatikan proses pembiayaan *murabahah* di Bank tersebut.
- b. Pihak Debitur hendaknya memberikan informasi mengenai spesifikasi objek yang akan dipesan secara rinci tidak hanya menyebutkan merk objek tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Aswar Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Sutan Remy Syahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Lexy J.Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, 1997, *Metedologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.